

**PERJUANGAN TANPA REVOLUSI:
PERSPEKTIF BARU DALAM MEMAHAMI KEKERASAN PERIODE
REVOLUSI DI INDONESIA TIMUR 1945-1950**

***STRUGGLE WITHOUT REVOLUTION:
A NEW PERSPECTIVE IN UNDERSTANDING VIOLENCE OF REVOLUTION
PERIOD IN INDONESIA TIMUR 1945-1950***

Burhaman Djunedding

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar
Kampus B. Jalan Baruga Raya Antang Makassar, Sulawesi Selatan 90234
Email: bur_pkpuh@yahoo.com

Naskah diterima tanggal 27 Agustus 2019, Naskah direvisi tanggal 2 September 2019, Naskah disetujui tanggal 2 Oktober 2019

Abstrak

Kajian ini menunjukkan pengalaman masa revolusi di Indonesia Timur yang sangat berbeda dengan pengalaman daerah-daerah lainnya di Indonesia, terutama Jawa dan Sumatera. Di kedua wilayah tersebut, pola perjuangan melawan Belanda adalah perjuangan heroik dengan menggunakan senjata, sebaliknya di Indonesia Timur pola perjuangannya memakai sarana politik yaitu pola perjuangan tanpa revolusi, bahkan karena kondisi sosial, politik dan keamanan yang berbeda maka di kalangan para “pejuang revolusi” di Indonesia Timur akhirnya juga memiliki perbedaan strategi. Meskipun sama-sama merasa *republikan*, kaum gerilya berjuang dengan bergerilya di pedalaman, sedangkan para politisi yang berada di kota berjuang melalui parlemen di Negara Indonesia Timur (NIT). Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dalam memahami revolusi di Indonesia Timur. Tahapan pertama yang dilakukan adalah penelusuran pustaka guna menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan kajian ini. Penelusuran literatur dilakukan di perpustakaan-perpustakaan di Yogyakarta. Penelusuran sumber pustaka juga dilakukan di Kota Makassar. Dari berbagai sumber pustaka yang menjadi rujukan, ditemukan keberagaman sifat dan karakteristik revolusi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk mendapatkan satu definisi seragam yang bisa merepresentasikan masa revolusi di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menempatkan kerangka berparlemen atau pola perjuangan politik di parlemen Negara Indonesia Timur sebagai bagian dari gambaran besar revolusi Indonesia yaitu revolusi yang tidak menggunakan senjata. Dengan kata lain, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang masa revolusi di Indonesia. Seperti kita ketahui, selama ini historiografi revolusi nasional Indonesia periode 1945-1949 merupakan masa dimana seluruh rangkaian cerita menggambarkan kisah heroik perjuangan bersenjata melawan Belanda.

kata kunci: kekerasan, revolusi, perjuangan parlemen.

Abstract

This study will show that the experience of revolution period in Indonesia Timur is very different with other regions, especially Java and Sumatra. In both regions, the fight against the Dutch was a heroic armed conflict, otherwise in Indonesia Timur the struggle is political struggle, the struggle without revolution. In fact, because of different social, politic, and security condition, the revolutionists in Indonesia Timur have different strategy. Although both felt republicans, the guerrilla struggle with the guerrilla in the rural areas, while the politicians who were in town struggling through parliament in Negara Indonesia Timur (NIT). This research used literary method to understand revolution in Indonesia Timur. The first step that was done was literary survey to learn about the literatures related to this study. The literary survey was conducted in libraries in Yogyakarta. The literary survey was also conducted in Makassar. Based on many sources, it is found that there were various

characteristics of revolution in many regions in Indonesia. This matter becomes a challenge to get one definition that can represent the revolution period in Indonesia. The main purpose of this research is to place the parliamentary framework or parliamentary struggle in Negara Indonesia Timur as part of Indonesian revolution which is called the revolution without violence. In the other words, this study is expected to give a new perspective in understanding the revolution period in Indonesia. It is well known that the historiography of revolution period is described as a heroic armed struggle against the Dutch.

keywords: *violence, revolution, struggle through parliament.*

PENDAHULUAN

Pengalaman revolusi tiap-tiap daerah di Indonesia sangatlah beragam sehingga tidak mungkin untuk mendapatkan gambaran yang seragam dan menyeluruh tentang masa lalu jalannya revolusi Indonesia. Keberagaman sifat dan karakteristik revolusi di tiap-tiap daerah tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam memahami jenis revolusi mana dan dengan jalan apa revolusi tersebut berlangsung. Apakah revolusi tersebut dilakukan melalui perjuangan bersenjata atau melalui kekuatan-kekuatan diplomasi atau gabungan dari keduanya. (Simatupang, 1982: 84). Tidak hanya itu saja, ada juga pola perjuangan yang lain, misalnya melalui pemogokan buruh, pembangkangan terhadap pemerintah, atau dengan perjuangan melalui suara, aspirasi dan mosi di parlemen.

Historiografi nasional Indonesia selama ini menggambarkan periode 1945-1949 sebagai masa revolusi dimana seluruh rangkaian cerita mengisahkan perjuangan heroik bersenjata melawan Belanda. (Ricklefs, 2005: 317-352). Masa revolusi digambarkan sebagai era perang fisik dengan menggunakan senjata dalam mempertahankan kemerdekaan. Seluruh unsur-unsur republik bergerak bahu-membahu mengangkat senjata dalam mempertahankan kedaulatan republik yang baru saja diproklamkan. Seluruh rangkaian cerita di masa revolusi adalah narasi perjuangan bersenjata dengan variannya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera dan perjuangan diplomasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Amerika.

Namun, bagi mereka yang menjadi korban kekerasan menganggap masa revolusi sebagai “era menyedihkan” atau “masa bersiap” dan akibat tidak adanya kebutuhan

yang mendesak untuk mengungkap kesedihan dan penderitaan mereka di masa revolusi, maka pengorbanan dan kesedihan mereka tersebut hanya bisa dimaknai sebagai konsekuensi dari peristiwa perang, (Joost Cote’ & Loes Westerbeek (eds), 2004). Atau seperti kata Taufik Abdullah, “revolusi bisa juga dikhianati oleh anaknya dan seperti ia juga kadang-kadang harus memakan anak sendiri”, (Abdullah, 1995: 3).

Penggambaran historiografi lokal Sulawesi Selatan pada masa revolusi juga dideskripsikan dengan narasi yang sama yaitu narasi perjuangan bersenjata. (Sanusi Dg. Mattata, 1967). Gambaran mengenai hal tersebut dapat dilihat saat diselenggarakannya seminar dengan tema “Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan Menentang Penjajah Asing” yang diselenggarakan di Makassar pada tanggal 8-11 Desember 1982. Sebanyak 18 (delapan belas) makalah yang dipresentasikan saat itu secara umum membahas tentang patriotisme, yakni perang bersenjata melawan kolonialisme di masa kolonial maupun di masa revolusi, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventaris Dan Dokumentasi Sejarah Nasional 1983/1984, 1982). Narasi-narasi yang serupa juga dapat dilihat pada kajian-kajian lainnya yang membahas periode kolonial dan masa revolusi di Sulawesi Selatan, (Kadir, dkk, 1984).

Apa yang telah dilakukan oleh sejarawan di tingkat lokal tersebut, seperti yang telah digambarkan di atas merupakan upaya untuk menempatkan Sulawesi Selatan atau Indonesia Timur sebagai bagian dari narasi besar sejarah nasional Indonesia. Jika masa revolusi dalam sejarah nasional digambarkan sebagai narasi perjuangan bersenjata, maka narasi sejarah lokal pun harus

juga demikian. Hal tersebut, oleh sebagian sejarawan dipahami sebagai perspektif nasional, yakni apa yang terjadi di tingkat lokal akan mempunyai arti apabila dipandang sebagai bagian dari sejarah nasional. Dengan kata lain, kejadian-kejadian di tingkat lokal diinterpretasikan berdasarkan hubungannya dengan peristiwa nasional (Kartodirdjo, 1982: 37-38).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian ini membahas tentang keberagaman narasi revolusi Indonesia, yakni narasi yang berbeda tentang masa revolusi yang terjadi di Indonesia Timur pada periode 1945-1950. Oleh karena itu, permasalahan dalam kajian ini lebih mudah dipahami jika dirumuskan dalam beberapa pertanyaan. Mengapa historiografi nasional dan historiografi lokal cenderung memahami masa revolusi dengan kacamata yang serupa yaitu kacamata “kekerasan” (perjuangan revolusi dengan menggunakan senjata)?, benarkah bentuk perjuangan di masa revolusi hanya bentuk perjuangan bersenjata?, bagaimana dan dengan jalan apa revolusi berlangsung di Indonesia Timur?, dan mengapa perjuangan dalam parlemen NIT juga dapat dimaknai sebagai tindakan revolusioner?

Kajian ini mengambil rentang waktu antara 1945-1950. Berbagai hal yang menarik dapat diungkapkan pada fase ini, seperti permasalahan-permasalahan di masa revolusi dan di saat yang sama juga berdiri Negara Indonesia Timur. Batasan ruang kajian ini adalah Negara Indonesia Timur (NIT), sebuah negara yang diproklamkan pada bulan Desember 1946 dan berhasil diakui eksistensinya oleh Republik pada bulan Maret 1947 setelah ditandatanganinya Perjanjian Persetujuan Linggarjati hingga pengakuan kedaulatan dari Belanda melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada akhir tahun 1949 dan bubarinya Negara Indonesia Timur (NIT) di akhir tahun 1950.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menempatkan kerangka berparlemen atau pola perjuangan politik di parlemen Negara Indonesia Timur sebagai bagian dari gambaran besar revolusi Indonesia yaitu revolusi yang tidak menggunakan senjata.

Dengan kata lain, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang masa revolusi di Indonesia. Seperti kita ketahui, selama ini historiografi revolusi nasional Indonesia periode 1945-1949 merupakan masa dimana seluruh rangkaian cerita menggambarkan kisah heroik perjuangan bersenjata melawan Belanda. Berdasarkan tujuan tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi upaya untuk memahami jalannya Revolusi di Indonesia Timur dan sekaligus memperkaya kajian tentang Revolusi Nasional yang selama ini belum banyak dilakukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Studi tentang masa revolusi dan Negara Indonesia Timur (NIT) telah dilakukan oleh beberapa peneliti, baik dari dalam maupun luar Indonesia. Meskipun demikian, kajian tentang parlemen sebagai bagian dari revolusi masih sangat terbatas. Sepanjang pengetahuan penulis, kajian semacam ini belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, untuk memahami pentingnya kajian ini maka perlu perbandingan dengan karya-karya terdahulu.

Satu disertasi penting J. R Chaniago “Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia: Peranan Pemimpin Lokal Dalam Dinamika Politik di Sulawesi Selatan dan Sumatera Timur 1950”. Berdasarkan pengamatannya, J.R. Chaniago melihat ada dua kategori kelompok politik yang saling bersaing dalam memperebutkan “kekuasaan” di Sulawesi Selatan di masa revolusi. Kelompok pertama adalah *kelompok* yang pro terhadap kekuasaan Belanda. Termasuk dalam kelompok ini adalah sebagian para raja dan kerabat bangsawannya, pejabat pemerintah NICA/kerajaan beserta pegawai-pegawainya, para anggota KL/KNIL/Polisi, dan sejumlah orang anti Republik yang berpihak pada Belanda. Kelompok kedua adalah kelompok pendukung republik, baik yang berada di pedalaman maupun di perkotaan. Sebagian dari mereka yang berada di perkotaan terbagi dalam kelompok-kelompok seperti pemimpin organisasi sosial politik serta para anggota

pemerintahan dan parlemen NIT (Negara Indonesia Timur) yang pro republik (Chaniago, 2002).

Buku Barbara Sillars Harvey yang berjudul *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. 1989) telah banyak memberi inspirasi dan membantu memahami masa-masa sebelum dan sesudah revolusi di Sulawesi Selatan. Meskipun tema utama kajian ini tentang pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan periode awal 1950-an, tetapi pada bab-bab tertentu khususnya Bab 4, membahas tentang revolusi (1945-1949) di Sulawesi Selatan. Barbara Sillars Harvey memahami bahwa selama revolusi, Sulawesi Selatan sangat menonjol karena menjadi tempat perlawanan yang paling hebat di luar Republik dalam menentang pengembalian kekuasaan Belanda. Tidak hanya itu, Sulawesi Selatan juga menjadi markas besar Negara Indonesia Timur (NIT). Hal tersebut karena Makassar sebagai ibukota Negara Indonesia Timur menjadi tempat berkumpulnya para politisi yang datang dari berbagai daerah di Indonesia Timur.

Barbara S. Harvey memahami bahwa revolusi di Sulawesi Selatan melahirkan dua kategori kelompok politik yang berbeda yaitu *boneka* dan *patriot*. Boneka adalah mereka yang pro-Belanda yang menguasai wilayah kota Makassar, sedangkan patriot adalah mereka yang menentang kembalinya kekuasaan Belanda dan melanjutkan perjuangan di wilayah pedalaman, (Harvey, 1989c: 219-221). Berbeda dengan J.R Chaniago, Harvey tidak melihat adanya dikotomi politik antara kelompok bangsawan dengan non bangsawan di masa revolusi. Dengan kata lain, dirinya tidak melihat revolusi melahirkan pro-kontra berdasarkan stratifikasi sosial, tetapi berdasarkan garis geografis kota dan pedalaman. Namun yang terpenting dari apa yang diamati oleh keduanya adalah bahwa pengalaman revolusi baik di pedalaman maupun di kota banyak mempengaruhi perjalanan politik lokal di Sulawesi Selatan pada periode selanjutnya.

Kajian Ichlasul Amal "*Hubungan Pusat-Daerah: Kasus Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan 1949-1979*" juga dapat

membantu memahami era revolusi di Sulawesi Selatan. Menurut Ichlasul Amal karena terbatasnya perhatian pemerintahan kolonial Belanda dan kurang kuatnya pengaruh pendudukan Jepang sangatlah berpengaruh terhadap besar kecilnya gerakan nasionalis di Sulawesi Selatan, baik sebelum perang maupun pada masa revolusi (Agung, 1985). Di Sulawesi Selatan gerakan nasionalis kurang begitu siap, sedangkan Sekutu dan Pejabat Belanda lebih siap untuk kembali memegang kekuasaan (Amal, 1988).

Meskipun demikian, munculnya perlawanan yang kuat dari kekuatan-kekuatan pro-republik di Sulawesi merupakan sesuatu yang tidak diperhitungkan Belanda. Hal ini sangat mengkhawatirkan Belanda karena Belanda berusaha meyakinkan dunia luar bahwa mayoritas orang Indonesia, terutama di Indonesia Timur, loyal terhadap mereka karena pada tahun 1946 Belanda telah mengumumkan rencananya untuk membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) dengan ibukotanya di Makassar. Untuk mendirikan NIT, Belanda mengadakan berbagai usaha untuk menyapakan perlawanan mereka yang pro-republik di Sulawesi Selatan. Perlawanan tersebut contohnya Belanda memanfaatkan persaingan antara pemimpin nasionalis dan juga menggunakan taktik adu domba di antara para bangsawan. Usaha yang lain adalah ditingkatkannya langkah-langkah represif terhadap perlawanan pemuda, seperti operasi militer yang dilakukan oleh Westerling pada akhir tahun 1946.

Kajian Ide Anak Agung Gde Agung yang berjudul "*Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*" sangat membantu dalam memahami dinamika politik sebelum dan sesudah berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT). Ide Anak Agung Gde Agung menguraikan bahwa yang melatarbelakangi berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT) diawali oleh Konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Juni 1946 - 25 Juni 1946. Konferensi Malino tidak mendapat sambutan yang baik dari kalangan Republik, bahkan media massa Republik sangat mencela prakarsa Belanda untuk mengadakan Konferensi Malino sebagai usaha Belanda untuk mendapatkan dukungan dari

wakil-wakil daerah di luar daerah kekuasaan Republik Indonesia.

Setelah Konferensi Malino, selanjutnya diselenggarakan Konferensi Denpasar di Bali yang berlangsung pada 7 Desember 1946 sampai 24 Desember 1946. Banyak kritik yang dilontarkan oleh beberapa kalangan seolah-olah Negara Indonesia Timur adalah ciptaan Van Mook atau pemerintah Hindia Belanda. Hal ini tidak benar karena hal yang dicapai dalam Konferensi Denpasar dalam mewujudkan peraturan pembentukan Negara Indonesia Timur adalah hasil perundingan yang bebas dan sederajat antara wakil-wakil daerah yang hadir dalam konferensi.

Selain membahas Konferensi Malino dan Konferensi Denpasar, kajian ini juga membahas tentang 8 (delapan) kabinet yang ada selama berdirinya Negara Indonesia Timur hingga dinyatakan bubar di pertengahan tahun 1950. Kabinet-kabinet tersebut antara lain; Kabinet Nadjamoedin Daeng Malewa (2 kali), Kabinet Warouw, Kabinet Ide Anak Agung Gde Agung (2 kali), Kabinet J.E Tatengkeng, Kabinet D.P Diapari, dan Kabinet J. Putuhena.

Hal yang membedakan kajian ini dengan kajian-kajian terdahulu, terutama kajian J.R Chaniago dan Ide Anak Agung Gde Agung yang juga membahas tentang Negara Indonesia Timur (NIT) dan Parlemen Negara Indonesia Timur adalah bahwa disertasi J.R Chaniago perhatian utamanya adalah ingin melihat nasionalisme dan pengalaman revolusi sebagai salah satu kekuatan sejarah dan studi yang dilakukan ingin melihat bagaimana cita-cita nasionalisme politik dan pengalaman berevolusi telah menjadi kekuatan pendorong disamping kekuatan-kekuatan yang lainnya seperti kemajemukan sosio-kultural yang mampu memberi dukungan kepada kesatuan politik dalam mewujudkan integrasi nasional, sedangkan kajian yang akan saya lakukan berupaya menempatkan revolusi sebagai kajian utama. Hal ini berbeda dengan J.R. Chaniago, Barbara Sillars Harvey, dan Ichlasul Amal yang membahas revolusi sebagai latar-belakang guna menunjang teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, dan kajian Ide Anak Agung Gde Agung dapat

dikategorikan sebagai "biografi politik" dirinya. Penting untuk diketahui juga bahwa bahwa Ide Anak Agung Gde Agung pernah menjadi Perdana Menteri Negara Indonesia Timur (NIT) pada Kabinet Ide Anak Agung Gde Agung Pertama (15 Desember 1947-12 Desember 1947) dan Kabinet Ide Anak Agung Gde Agung Kedua (12 Januari-27 Desember 1949). Sebelum menjadi Perdana Menteri, dirinya juga tercatat pernah menduduki jabatan strategis di Negara Indonesia Timur (NIT), yaitu sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri merangkap Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Nadjamoedin Daeng Malewa Pertama dan Kabinet Nadjamoedin Daeng Malewa Kedua.

Kajian Ide Anak Agung Gde Agung juga menyangkut parlemen Negara Indonesia Timur (NIT) yang dirinya juga terlibat di dalamnya. Oleh karena itu Ide Anak Agung Gde Agung termasuk juga sejarawan parlementer karena sebagian besar fokus perhatian dalam kajiannya adalah parlemen Negara Indonesia Timur (NIT). Fokus perhatian kajiannya terbatas pada narasi tentang segala sesuatu yang telah terjadi di dalam Parlemen NIT dan sejarah mengenai hal tersebut, sedangkan pertanyaan mengapa hal tersebut dapat terjadi tidaklah menjadi perhatiannya. Dengan kata lain, dirinya tidak melihat peristiwa sejarah dengan pendekatan interdisipliner seperti yang telah dilakukan oleh Sartono Kartodirdjo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dalam memahami revolusi di Indonesia Timur. Tahapan pertama yang dilakukan adalah penelusuran pustaka guna menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan kajian ini. Penelusuran literatur dilakukan di perpustakaan-perpustakaan di Yogyakarta, antara lain: Perpustakaan Ignatius, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Perpustakaan Unit I dan II Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Hatta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UGM, Perpustakaan Pusat Studi Asia Tenggara, dan

Perpustakaan Daerah di Jalan Malioboro Yogyakarta.

Penelusuran sumber pustaka juga dilakukan di Kota Makassar yakni di Kantor Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Dari berbagai sumber pustaka yang menjadi rujukan, ditemukan keberagaman sifat dan karakteristik revolusi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk mendapatkan satu definisi seragam yang bisa merepresentasikan masa revolusi di Indonesia. Oleh karena itu, para peneliti dalam mendefinisikan revolusi adalah dengan mengambil sudut pandang tertentu. Sebagai contoh, Anthony Reid yang secara umum memahami revolusi sebagai restrukturisasi fundamental dari suatu sistem politik dengan kekerasan dalam waktu yang relatif singkat. Jika melihat polanya, maka hampir semua revolusi yang telah terjadi di berbagai belahan dunia ini biasanya dimulai dengan tindakan membangkang, menghancurkan rezim lama, dan berakhir dengan memaksakan suatu rezim baru yang relatif stabil, (Anthony Reid, 1981: 33). Demikian juga halnya dengan revolusi Indonesia yang bertujuan untuk menghancurkan rezim lama. Akibat nyata yang paling menonjol dari revolusi Indonesia adalah terciptanya bangsa yang bersatu (Reid, 1981:35).

Bangsa yang bersatu adalah impian dari mereka yang terlibat dalam revolusi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Taufik Abdullah. Lebih jauh lagi, dirinya berpendapat bahwa jika tidak karena harapan dan impian tentang keutuhan sebuah bangsa yang berdaulat, untuk apa mereka para pejuang dengan sepotong bambu runcing berani menghadang panser dan tank serba modern. Dengan demikian, revolusi nasional memberikan suatu kesadaran bahwa mereka terlibat dalam dinamika dan gejolak sejarah bangsa (Abdullah, 1995: 3).

Taufik Abdulah memahami revolusi sebagai wujud kesadaran yang didorong oleh mimpi diri, kelompok, dan bangsa tentang sebuah keutuhan, sedangkan Sartono Kartodirdjo memahami masa revolusi sebagai masa krisis sosial dan politik dengan intensitas tinggi. Masa krisis itu disebabkan oleh adanya perasaan tidak aman dan penuh kegelisahan

yang menyangkut soal kelangsungan hidup. Revolusi sebagai suatu proses politik yang timbul dalam situasi krisis pada waktu golongan-golongan konflik mengusahakan perubahan politik dengan cara-cara radikal (Kartodirdjo,1982: 80-81). Revolusi yang berlangsung setidaknya membentuk dua golongan dalam masyarakat yang saling bertentangan yaitu antara golongan konservatif dengan golongan progresif. Golongan konservatif didukung oleh unsur-unsur tradisional dalam masyarakat yang masih ingin mempertahankan kekuasaan lama yang terlanjur ada, sedangkan golongan progresif didukung oleh kaum intelektual yang cenderung menginginkan perubahan.

Berdasarkan pengalaman saat mengkaji Sulawesi Selatan dan Sumatera Timur, J.R Chaniago memahami masa revolusi sebagai masa yang penuh dengan ketidakpastian. Sebagaimana Sartono Kartodirdjo, J.R. Chaniago juga melihat revolusi sebagai gejala sosial dan politik. Disebabkan oleh ancaman kolonialisme yang sangat kuat, maka revolusi bisa menghentikan keadaan normal dan mengubah tatanan nilai yang ada (Chaniago, 2002:37). M.C Ricklefs melihat masa revolusi sebagai masa yang kacau balau penuh dengan pertentangan-pertentangan, yakni masa mengenai orang-orang Indonesia yang mendukung dan tidak mendukung revolusi, antara mereka yang mendukung revolusi sosial dengan mereka yang menentangnya. Revolusi juga dimaknai sebagai pertentangan antara golongan kiri dan golongan kanan, antara kekuatan-kekuatan Islam dan kekuatan sekuler, maupun pertentangan antara yang mendukung perjuangan diplomasi dengan perjuangan bersenjata (Ricklefs, 2005: 317).

William H. Frederick (2005:297-365) memahami revolusi dari sudut pandang berbeda dari yang selama ini dilihat oleh berbagai kalangan. Dirinya memahami revolusi dengan mengamati penampilan, pakaian, seragam, dan gaya pemuda. Dengan metode ini dirinya mampu menghadirkan sebuah sejarah perjuangan kemerdekaan yang tidak lagi konvensional, yakni sebuah sejarah perjuangan yang tidak lagi menonjol-nonjolkan kekuatan-kekuatan fisik atau

kekuatan-kekuatan bersenjata, tetapi berusaha melihat aspek-aspek lain yang juga merupakan faktor penentu dalam sejarah revolusi Indonesia. Salah satu citra tentang Revolusi Indonesia yang paling kuat dan romantis adalah para pejuang kemerdekaan yang berambut panjang dan berpenampilan seperti jagoan. Dengan pakaian yang dilengkapi dengan atribut yang memberi mereka kekuatan dan dilengkapi dengan kemampuan berbicara, mereka merupakan orang-orang yang meneruskan jiwa revolusi.

Kajian ini juga berupaya melihat revolusi dari sisi yang berbeda, seperti halnya William H. Frederick melihat revolusi dari sisi penampilan, pakaian dan gaya pemuda. Revolusi dalam kajian ini tidak lagi dimaknai sebagai perjuangan fisik berupa perjuangan bersenjata, tetapi dilihat dari bentuk yang lain seperti aktivitas-aktivitas politik di Parlemen Negara Indonesia Timur (NIT). Parlemen yang sering dibagi atas fraksi-fraksi seperti Fraksi Progresif yang bersikap oposisi, Fraksi Pembangunan yang mendukung pemerintah atau juga seperti yang terjadi setelahnya yaitu Fraksi Nasional, Fraksi Demokrat, dan fraksi lainnya.

Perspektif Nasional dalam Memahami Peristiwa Lokal

Dalam buku sejarah lokal di Indonesia, Taufik Abdullah (1985) panjang lebar menguraikan perbedaan mendasar antara sejarah lokal dan sejarah nasional. Menurutnya, jika sejarah nasional adalah sejarah yang mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia, maka sejarah lokal adalah sejarah dari daerah administratif yang disebut provinsi, kabupaten, dan desa. Obyek dari sejarah lokal pada umumnya tidak identik dengan sejarah nasional, baik aspek temporal maupun spatial-nya. Kedua unit kajian sejarah ini termasuk dua kategori sejarah yang berbeda (Kartodirdjo, 1982: 35). Keduanya menuntut perumusan permasalahan yang berbeda dan skala penting dari peristiwa yang berbeda pula (Abdullah, 1985: 16).

Meskipun berbeda, perspektif nasional adalah aspek yang paling sentral dalam mengkaji sejarah Indonesia, baik dalam

skala nasional maupun skala lokal. Adapula yang memahami bahwa sejarah lokal baru mempunyai arti apabila dipandang sebagai bagian dari sejarah nasional, dengan kata lain kejadian-kejadian diinterpretasikan dalam hubungannya dengan peristiwa-peristiwa sejarah nasional (Kartodirdjo, 1982: 38). Pentingnya perspektif nasional dalam historiografi Indonesia, menurut Sartono Kartodirdjo, karena kita hidup dalam pertumbuhan negara *nation*, maka pandangan nasional adalah kebutuhan real, artinya banyak permasalahan sentral yang kita hadapi sekarang dan masa yang akan datang adalah masalah nasional (Kartodirdjo, 1982: 35).

Tentu saja perspektif nasional bisa dipahami dan dimaknai sebagai wujud dari historiografi yang didasarkan pada semangat nasionalisme (Purwanto, 2006: 182-183). Perspektif nasional menggambarkan era revolusi sebagai masa perlawanan terhadap kolonialisme dan patriotisme dalam mempertahankan kemerdekaan. Perspektif ini juga membentuk dominasi “wacana militer” dalam historiografi Indonesia yaitu perjuangan menggunakan senjata dan menjadi simbol utama dan wacana masyarakat tentang kemerdekaan, patriotisme dan nasionalisme (Purwanto, 2006: 199-200).

Dengan demikian, dalam kajian revolusi harus dibedakan antara *national concent* dengan *local perspective*, kalau yang pertama menyangkut masalah “ide yang menyebar”, maka yang kedua ialah bagaimana dinamika lokal berhadapan dengan ide tersebut. Sejarah revolusi dengan persepektif nasional menekankan bahwa revolusi paling dominan ditentukan oleh elit pusat, padahal sebagaimana diketahui pada tahun 1946, daerah lain terpisah dengan pusat (Abdullah, 2001: 104).

Pengalaman Singkat Revolusi Terbatas

Pengalaman kekerasan di masa revolusi di Indonesia Timur sangatlah berbeda dengan pengalaman daerah lain di Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. Pengalaman yang berbeda tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah yang berbeda jauh sebelum terjadinya revolusi. Di wilayah Indonesia

Timur kolonialisme dan nasionalisme memiliki sejarah yang cukup singkat (Sutherland, 2013: 41).

Meskipun Sulawesi Selatan sudah ditaklukkan lewat Perang Makassar (1667-1669), tetapi setelah tahun-tahun tersebut, perhatian penguasa kolonial baik kompeni maupun pemerintah Hindia Belanda terhadap Indonesia Timur dapat dikatakan masih sangat sedikit dibanding perhatian mereka terhadap Jawa dan Sumatera. Dapat disimpulkan bahwa intervensi kolonial terhadap Indonesia Timur baru meningkat setelah tahun 1905, sangat tidak sebanding dengan intervensi kekuasaan kolonial terhadap Jawa dan Sumatera (Harvey, 1989:212). Ada kemungkinan konteks ekonomilah yang melatarbelakangi lambatnya intervensi kolonial yang lebih luas di Indonesia Timur.

Benedict Anderson dalam bukunya *Revolusi Pemuda* (1985) menganggap masa pendudukan Jepang dan latihan-latihan kemiliteran yang diberikan Jepang tahun 1942-1945 menjadi akar praktek dan pembenaran atas “kekerasan” dan perjuangan terutama di masa revolusi. Masa pendudukan Jepang yang singkat tersebut dianggap sebagai titik awal dari kekerasan yang dilegitimasi. Konsep tersebut berbeda dengan Henk Schulte Nordholt yang mengemukakan bahwa praktek kekerasan berakar dari tradisi politik Indonesia zaman kerajaan yang kemudian dikembangkan di masa kolonial lalu diadopsi dan dihidupkan kembali di era post-kolonial. Selanjutnya, aksi-aksi kekerasan fisik kolonial diwariskan pada generasi berikutnya termasuk di masa revolusi (Nordhold, 2002: 34-71).

Ketika Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942, Jepang kemudian membagi seluruh bekas Hindia Belanda menjadi tiga wilayah utama yang terpisah antara satu dengan yang lain; yakni pasukan Angkatan Darat ke-16 bertanggung jawab atas Jawa, lalu Sumatera dibawah pemerintahan Angkatan Darat ke-25 dan Armada Barat Daya Angkatan Laut Jepang memerintah seluruh Indonesia bagian timur (Zed, 2005: 13-14).

Sebagaimana penguasa kolonial, perhatian yang minim juga diberikan oleh angkatan laut Jepang ketika berkuasa selama tiga setengah tahun di Indonesia Timur

(Kalimantan, Sulawesi, dan Sunda Kecil). Angkatan Laut Jepang sepertinya tidak mempunyai rencana apapun untuk mendukung partisipasi kelompok-kelompok nasionalis di wilayah ini. Sikap dasar mereka adalah represif dan ini berarti membiarkan kelompok nasionalis untuk tidak berkembang. Mereka melarang semua partai politik dan menyatukan lima puluh organisasi Islam ke dalam satu wadah tunggal yaitu *Djamiah Islamiah* (Harvey, 1989c: 214). Organisasi ini didirikan pada tahun 1942 yang diprakarsai oleh seorang Muslim Jepang yang bernama Shahibul Fadhilah H. Oemar Faisal yang sekaligus bertindak sebagai ketuanya (Amal, 1988: 37).

Namun, menjelang kekuasaannya berakhir, Jepang mencoba mendekati kelompok-kelompok nasionalis Sulawesi Selatan. Pada bulan April 1944 *Minseibu* telah memilih dan mengangkat Anggota Dewan Propinsi yang sebagian besar anggotanya berasal dari tokoh-tokoh lokal. Setahun kemudian, tepatnya pada bulan Mei 1945 pemerintah militer Jepang mengangkat Nadjamoeddin Dg. Malewa menjadi Walikota Makassar dan lima orang penasehatnya antara lain: Lanto Dg. Pasewang, Haji Sewang Dg. Muntu, M.A Palupessy, Thio Heng Sioe dan Hoesoe Dg. Manangkasi (Propinsi Sulawesi, 1991: 216). Lalu, pada bulan Juni, Jepang mendirikan organisasi Sudara (*Sumber Darah Rakyat*) atau *Ken Koku Dosi* dan mengangkat Andi Mapanyukki (*Raja Bone*) sebagai ketua. Tujuan Jepang mendirikan organisasi ini adalah untuk mempersatukan berbagai faksi elit nasionalis yang kecil di kota tersebut dengan para penguasa aristokrat tradisional di Sulawesi Selatan (Harvey, 1989c: 215).

Meskipun cukup terlambat, Jepang juga membentuk *Boei Taisintai*, yaitu barisan pemuda sebagai wadah latihan semi-militer yang ketuanya adalah Manai Sofyan. Namun, pasukan sukarela Peta (Pembela Tanah Air) seperti yang terbentuk di Jawa tidak boleh dibentuk di wilayah kekuasaan angkatan laut Jepang. Selain *Boei Taisintai* yang berpusat di Makassar, penguasa Jepang juga memfasilitasi berdirinya sekolah pelaut *Kiin Yasejo* di Pare-Pare, *Heihoo* tanpa dilengkapi dengan persenjataan, *Seinedan* dan *Djozi Seinedan*, yaitu perkumpulan muda-mudi, sedangkan

kaum ibu juga diperbolehkan membentuk organisasi yang bernama *Fujinkai* (Rapi, 1988:196).

Barisan Pemuda, *Boei Taisintai* yang dibentuk pada awal tahun 1945 merupakan latihan semi-militer yang ditujukan kepada pemuda yang berusia antara 17-30 tahun. Selain latihan militer, ditanamkan juga semangat cinta tanah air dan anti terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan Barat. Setelah Proklamasi barisan pemuda, *Boei Taisintai*, *Heihoo*, dan *Seinendan* bergabung ke dalam angkatan muda PPNI (Pusat Pemuda Nasional Indonesia), Ketua Umumnya adalah Manai Sofyan, Wakil Ketua Sofyan Sunari, dan Massiara selaku Sekjen. PPNI bermarkas di rumah ketua umumnya yaitu Manai Sofyan di Kampung Sawah Makassar. PPNI merupakan sebuah organisasi pejuang pemuda untuk membela Indonesia Merdeka.

Organisasi PPNI inilah yang bertanggung jawab terhadap beberapa peristiwa “heroik” yang terjadi pasca Proklamasi 17 Agustus 1945 di Kota Makassar, seperti Peristiwa “Ambon Moord” pada 3 Oktober 1945, yaitu peristiwa penyerangan dan pembunuhan terhadap orang-orang Ambon yang dianggap berpihak kepada tentara KNIL, NICA dan Belanda. Peristiwa ini baru mereda ketika seluruh keluarga Ambon yang ada di Kota Makassar diungsikan ke Benteng Ford Rotterdam. Peristiwa tersebut dipicu oleh “Peristiwa 2 Oktober 1945” yaitu penembakan brutal oleh serdadu KNIL (suku Ambon) terhadap pemuda merah-putih di beberapa tempat di Makassar, antara lain Pantai Losari, Karebosi, dan Jalan Maros. Peristiwa penembakan tersebut memicu terjadinya peristiwa “Ambon Moord”.

Organisasi PPNI juga terlibat dalam beberapa peristiwa pada 28 Oktober 1945 di Kota Makassar, seperti penyerangan Markas sementara Komando KNIL di Hotel Empres Makassar, penyerangan terhadap Stasiun Radio di Mattoanging, tangsi Militer KNIL di pinggir Pantai Mariso, dan tangsi Polisi di Jalan Gowa. Dari berbagai peristiwa tersebut dilaporkan bahwa ada sekitar 40 orang pemuda yang ditangkap oleh KNIL dan mereka

kemudian ditahan di Kantor Polisi NICA di Mariso (Massiara, 1988: 230).

Perjuangan Tanpa Revolusi

Pola perjuangan revolusi di Jawa dan Sumatera dipenuhi dengan tindakan-tindakan heroik dengan menggunakan senjata, sebaliknya di Indonesia Timur pola perjuangannya memakai sarana-sarana politik yaitu pola perjuangan tanpa revolusi (Chaniago, 2002: 234). Dikarenakan kondisi sosial, politik dan keamanan yang berbeda, maka di kalangan para pejuang revolusioner di Indonesia Timur juga memiliki perbedaan strategi. Meskipun sama-sama merasa *republikan*, kaum gerilya berjuang dengan bergerilya di pedalaman, sedangkan para politisi yang berada di kota berjuang melalui parlemen di Negara Indonesia Timur (NIT).

Meskipun pada awal revolusi Sulawesi Selatan menonjol sebagai tempat perlawanan terhadap rencana pemulihan kekuasaan Belanda di Indonesia Timur, tetapi tidak lama kemudian segala bentuk perlawanan cepat dapat dikendalikan. Untuk meredam perlawanan dari kelompok-kelompok gerilya di pedalaman, Belanda melakukan kampanye pasifikasi pada bulan Desember 1946 hingga Maret 1947. Kampanye tersebut dipimpin oleh Kapten Westerling yang sangat terkenal dengan operasi militernya yang kejam dengan menewaskan ratusan bahkan ribuan jiwa warga sipil tak berdosa atau mereka yang dituduh sebagai pengacau (Ricklefs, 2005: 337). Peristiwa ini kemudian dikenal dengan “korban 40.000 jiwa” yang dimaknai oleh banyak kalangan sebagai peristiwa nasional dan merupakan bukti nyata pengorbanan rakyat Sulawesi Selatan di masa revolusi (Lahade, 1982:394).

Masa pemerintahan NIT yang dimulai sejak 1946 sampai dibubarkan di pertengahan tahun 1950 merupakan masa yang paling rumit dan masih belum banyak dibahas dan dipahami oleh sejarawan (Pradadimara, 2016: 13). Masa tersebut merupakan masa dimana perjuangan bersenjata untuk menentang NIT dan mempertahankan republik mustahil untuk

dilakukan. Hal tersebut tampaknya sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh tentara Australia di wilayah timur Indonesia yang sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh tentara Inggris di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, tentara Inggris melarang campur tangan Belanda dalam hal keamanan dan pemerintahan, sedang di Sulawesi dan daerah-daerah Indonesia Timur pada umumnya, pihak Australia menganjurkan Belanda untuk membentuk pemerintahan sipil di bawah pengawasan tentara mereka (Agung, 1985: 40).

Dengan demikian, melawan Belanda dengan menggunakan senjata adalah suatu tindakan yang mustahil dan sia-sia, terlebih setelah diterimanya Perjanjian Linggarjati oleh Republik Indonesia di bulan Maret 1947 sebagai bentuk pengakuan Republik terhadap kembalinya kekuasaan Belanda atas wilayah Indonesia Timur. Dengan diterimanya Perjanjian Linggarjati tersebut, maka banyak kalangan di Indonesia Timur yang menilai bahwa Republik telah menyerahkan Indonesia Timur kepada Belanda karena tidak memasukkan Indonesia Timur ke dalam daerah yang ditetapkan sebagai wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, ruang yang tersisa untuk berjuang menentang kembalinya kekuasaan Belanda adalah dalam kelembagaan dan parlemen NIT (Frederick dan Soeroto (peny.), 1982: 369).

Proses terbentuknya Parlemen NIT tidak dapat dipisahkan dengan Konferensi Denpasar yang diselenggarakan pada akhir tahun 1946. Di sela-sela konferensi juga diadakan pemilihan anggota parlemen utusan dari berbagai daerah di Indonesia Timur. Di akhir konferensi, tepatnya pada tanggal 24 Desember 1946 diambil sumpah ketua terpilih Mr. Tadjuddin Noor dan pelantikan anggota parlemen terpilih. Parlemen NIT terdiri dari 70 anggota dan dari jumlah tersebut 55 diantaranya melalui pemilihan dan sisanya 15 diangkat. Anggota parlemen yang diangkat mewakili golongan minoritas seperti Belanda, Cina, dan Timur Asing lainnya ditambah beberapa orang Indonesia yang dianggap mempunyai kedudukan dan pengaruh yang terpenting dalam masyarakat tetapi tidak

terwakili dalam Konferensi Denpasar (Agung, 1985: 125).

Pada awalnya, Parlemen NIT terdiri dari dua fraksi yaitu Fraksi Pembangunan dan Fraksi Progresif. Fraksi Pembangunan adalah fraksi yang dahulu mendukung pencalonan Tjokorde Gde Rake Soekowati sebagai Presiden NIT, sedangkan Fraksi Progresif yang mendukung pencalonan Mr. Tadjuddin Noor. Unggul dalam pemilihan tersebut adalah Tjokorde Gde Rake Soekowati dengan perolehan 37 suara parlemen, sedangkan Mr. Tadjuddin Noor hanya memperoleh 32 suara parlemen. Dengan demikian, yang terpilih sebagai Presiden NIT adalah Tjokorde Gde Soekowati.

Dinamika dalam Parlemen NIT mengikuti pola yang sudah terbentuk sebelumnya, yakni Fraksi Pembangunan di bawah ketuanya Sonda Daeng Mattayang yang konservatif mendukung segala kebijakan pemerintah. Sebaliknya, Fraksi Progresif ketuanya Abdullah Daeng Mappuji memilih beroposisi dan senantiasa menentang kebijakan pemerintah. Polarisasi politik dalam parlemen terus terjadi sejak awal terbentuk hingga bubarnya NIT.

Pada perkembangan selanjutnya, Parlemen NIT terbagi atas tiga fraksi. Pertama adalah Fraksi Demokrat yang anggota-anggotanya pro Pemerintah NIT, ketua fraksinya Nadjamuddin Daeng Malewa. Fraksi kedua adalah Fraksi Progresif yang ketuanya Arnold Mononutu yang dianggap fraksi oposisi terhadap pemerintah, dan Fraksi ketiga adalah Fraksi Nasional yang merupakan fraksi netral yang tidak berpihak di antara kedua fraksi yang saling berbeda pendapat di parlemen NIT (Nelanan, 1981: 181).

Saat Parlemen NIT membuka sidangnya yang pertama pada 22 April 1947 di Makassar, anggota parlemen terutama golongan progresif menunjukkan sikap yang tegas menentang *politik manifest* Pemerintah NIT, bahkan banyak diantara anggota-anggota parlemen yang mengucapkan pandangan umumnya yang terang-terangan pro-Republik, misalnya Nani Wartabone dari Gorontalo saat sidang mengucapkan “sekali ke Djogja tetap ke Djogja, sekali merdeka tetap merdeka”(Republik Indonesia, 1953: 132)

Setelah Nani Wartabone mengemukakan pandangannya di sidang parlemen NIT, maka sidang parlemen menjadi bertambah panas. Pertentangan antara golongan oposisi dan golongan pemerintah semakin parah sehingga Sonda Daeng Mattayang atas nama anggota parlemen golongan pemerintah mengajukan sebuah mosi tak percaya terhadap kebijakan Mr. Tadjuddin Noor yang dianggap berat sebelah terhadap golongan oposisi yang tidak mampu meredam perkataan-perkataan yang diucapkan oleh golongan yang pro-republik seperti Nani Wartabone (Republik Indonesia, 1952: 132)

Sehubungan dengan gaduhnya sidang, maka anggota Fraksi pendukung pemerintah Sonda Daeng Mattayang mengajukan mosi tak percaya terhadap Ketua Parlemen Mr. Tadjuddin Noor. Pada sidang 27 Mei 1947, ketua Parlemen Mr. Tadjuddin Noor bersama 32 anggota anggota parlemen dari Fraksi Progresif meniggalkan ruang sidang dan menyerahkan palu pimpinan sidang kepada wakil ketua I Mr. S Binol. Mosi tak percaya tersebut berhasil menggantikan ketua Parlemen yang baru yaitu Sultan Moehammad Kaharoeddin dari Sumbawa. Hari itu juga Presiden Soekowati melantik ketua parlemen yang baru terpilih.

Namun, menjelang RIS terbentuk, anggota Parlemen NIT bertambah menjadi 80 orang yang terbagi atas 4 fraksi dan 1 kelompok non-fraksi. Fraksi Progresif dengan anggota sebanyak 33 orang, Fraksi Nasional sebanyak 22 orang, Fraksi Demokrat 5 orang, Fraksi I.E.V sebanyak 3 orang, dan Non-Fraksi 5 orang. Fraksi Progresif dipimpin oleh Arnold Monnutu yang berasal dari Maluku Utara, Fraksi Nasional diketuai oleh Andi Massarapi dari Sulawesi Selatan, Fraksi Demokrat ketuanya F.A.P Pitoi dari Sulawesi Utara dan Non-Fraksi O. Basalamah dari Gorontalo, Dr. H. Bergema seorang Pastor dari Makassar dan yang lainnya (Chaniago, 2002: 233-234).

Dari empat fraksi yang ada dalam Parlemen NIT sampai terbentuknya parlemen baru 1949, Fraksi Progresif lebih condong memperjuangkan aspirasi Republik. Sikap Fraksi Progresif ini sering berbeda dengan

sikap fraksi yang lain, termasuk Fraksi Nasional yang terkadang tidak terang-terangan pro Republik. Sepanjang bulan Januari - Februari 1947 terjadi kontak senjata antara KNIL dengan Laskar Pejuang yang mendapat perhatian Parlemen NIT, diantaranya pertempuran Kassi-Kassi yang menewaskan Emmy Saelan dan Pertempuran Langese Komara di perbatasan Gowa-Jeneponto yang menewaskan Ranggong Daeng Romo dan menjebloskan Robert Wolter Mongisidi di penjara Hoogepad Makassar.

Dari berbagai peristiwa tersebut, fraksi Progresif yang dipimpin Arnold Mononutu berusaha menjatuhkan kabinet Warrouw yang secara terang-terangan mendukung kebijakan KNIL yang bersikap tegas terhadap pejuang Republik. Dengan berbekal koalisi dengan anggota Fraksi Nasional yang pro Republik akhirnya berhasil menjatuhkan Kabinet Warrouw dan Kabinet Mr. Anak Agung Gde Agung.

Mr. Anak Agung Gde Agung yang menjadi Perdana Menteri setelah Warraow meski tidak secara transparan mengucapkan pro Republik, kebijakannya selalu berusaha mendekati NIT dan Republik. Obsesi Anak Agung sebagaimana yang sering diucapkan dalam pidato-pidatonya, baik sebagai Perdana Menteri NIT maupun sebagai Menteri Dalam Negeri, menghendaki adanya kesetaraan antara NIT dan Republik dan memperjuangkan kemerdekaan secara damai, tidak melalui revolusi (Chaniago, 2002: 236).

Pada tanggal 5-7 Februari 1950 diselenggarakan Konferensi Polongbangkeng yang dihadiri sekitar 2000 orang utusan dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Tujuan konferensi ini untuk menyatukan visi perjuangan kemerdekaan sesuai Proklamasi 17 Agustus 1945. Dukungan terhadap konferensi juga datang dari Parlemen NIT hasil pemilu yang dilantik pada tanggal 20 Februari 1950. Sebagian besar anggota Parlemen NIT adalah muka-muka baru seperti Lanto Daeng Pasewang yang Pro Republik. Parlemen NIT yang baru ini terdiri dari 4 Fraksi yakni fraksi Kesatuan (22 anggota) dipimpin oleh Lanto Daeng Pasewang, Fraksi Nasional Konstruktif (20 anggota) dipimpin oleh Hussein Puang

Limboro, Fraksi Kerakyatan (11 anggota) dipimpin oleh E.V Pupella, dan sisanya masuk Fraksi Indonesia yang meliputi utusan dari Sumbawa, Lombok dan Gorontalo. Perjuangan lewat parlemen terus dilakukan hingga terbentuknya Kabinet Putuhena pada bulan Mei 1950 dan Kabinet ini kemudian disebut sebagai “Kabinet Likwidasi” untuk menunjuk pada tugasnya untuk membubarkan NIT dan berlanjut pada Republik Indonesia Serikat yang dibubarkan pada 15 Agustus 1950 dan terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENUTUP

Pengaruh kolonialisme Belanda yang tidak terlalu signifikan dan Pendudukan Jepang yang cukup singkat menjadikan Indonesia Timur kurang siap menghadapi revolusi jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Di wilayah Indonesia Timur, kolonialisme dan nasionalisme memiliki sejarah yang cukup singkat. Meskipun wilayah timur Indonesia sudah ditaklukan lewat Perang Makassar, tetapi setelah tahun-tahun tersebut, perhatian penguasa kolonial baik kompeni maupun pemerintah Hindia Belanda terhadap Indonesia Timur masih kurang porsinya.

Perhatian pemerintah kolonial baru meningkat setelah tahun 1905 ketika Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942 dan Jepang membagi seluruh bekas Hindia Belanda menjadi tiga wilayah utama yang terpisah antara satu dengan yang lain, yakni pasukan Angkatan Darat ke-16 bertanggung jawab atas Jawa, lalu Sumatera dibawah pemerintahan Angkatan Darat ke-25, dan Armada Barat Daya Angkatan Laut Jepang memerintah seluruh Indonesia bagian timur. Sama halnya dengan penguasa kolonial, kurangnya perhatian juga terjadi saat berkuasanya angkatan laut Jepang selama tiga setengah tahun di Indonesia Timur (Kalimantan, Sulawesi dan Sunda Kecil). Angkatan Laut Jepang sepertinya tidak mempunyai rencana apapun untuk mendukung partisipasi kelompok-kelompok nasionalis di wilayah ini. Sikap dasar mereka adalah represif dan ini berarti membiarkan kelompok nasionalis untuk tidak berkembang.

Meskipun pada awal revolusi Sulawesi Selatan menonjol sebagai tempat perlawanan terhadap rencana pemulihan kekuasaan Belanda di Indonesia Timur, tetapi tidak lama kemudian segala bentuk perlawanan cepat dapat dikendalikan. Untuk meredam perlawanan dari kelompok-kelompok gerilya di pedalaman, Belanda melakukan kampanye pasifikasi pada bulan Desember 1946 hingga Maret 1947. Kampanye tersebut dipimpin oleh Kapten Westerling yang sangat terkenal dengan operasi militernya yang kejam dengan menewaskan ratusan bahkan hingga ribuan jiwa warga sipil tak berdosa atau mereka yang dituduh sebagai pengacau. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan “korban 40.000 jiwa” yang dimaknai oleh banyak kalangan sebagai peristiwa nasional dan merupakan bukti nyata pengorbanan rakyat Sulawesi Selatan di masa revolusi.

Dengan demikian, melawan Belanda dengan menggunakan senjata adalah suatu tindakan yang mustahil dan sia-sia, terlebih setelah diterimanya Perjanjian Linggarjati oleh Republik Indonesia di bulan Maret 1947 sebagai bentuk pengakuan Republik terhadap kembalinya kekuasaan Belanda atas wilayah Indonesia Timur. Dengan diterimanya Perjanjian Linggarjati tersebut, maka banyak kalangan di Indonesia Timur yang menilai bahwa Republik telah menyerahkan Indonesia Timur kepada Belanda dengan tidak memasukkan Indonesia Timur ke dalam daerah yang ditetapkan sebagai wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, ruang yang tersisa untuk berjuang menentang kembalinya kekuasaan Belanda adalah melalui kelembagaan dan parlemen NIT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Massiara Daeng Rapi. 1988., *Menyikap Tabir Sejarah dan Budaya di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Yayasan Bhinneka Tunggal Ika.
- Anhar Gonggong. 1992., *Abdul Qahhar Mudzakkar: Dari Patriot Hingga Pemberontak*. Jakarta: PT. Grasindo Widiararana Indonesia.

- Bambang Purwanto. 2006. *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!*. Yogyakarta: Ombak.
- Burhaman Djunedding. 2010. "Pesta Demokrasi Di Daerah Bergolak: Politik Tingkat Lokal dan Pemilihan Umum 1955 di Sulawesi Selatan," *Tesis Universitas Gadjah Mada*, 2010, tak diterbitkan.
- Burhaman Djunedding. 2016. "Dari Sejarah Lokal Sulawesi Selatan ke Sejarah Lokal Sulawesi Selatan dan Barat: Memikirkan Perspektif Baru Sejarah Lokal", *Prosiding Seminar Nasional dan Rapat Kerja Perhimpunan Program Studi Sejarah Se-Indonesia*, dengan Tema "Mempertimbangkan Buku-buku Acuan Sejarah Indonesia, Meninjau Historiografi Mutakhir Indonesia", Makassar.
- Burhan Djabier Magenda. 1989. "The Surviving Aristocracy In Indonesia: Politic In Three Of The Outer Island". *Disertasi Universitas Cornell*. tak diterbitkan.
- Cote, Joost' & Loes Westerbeek (eds). 2004. *Recalling The Indies: Kebudayaan Kolonial dan Identitas Poskolonial*, Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- Cribb, Robert Bridson. 1990. *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945-1949: Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventaris Dan Dokumentasi Sejarah Nasional 1983/1984, *Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Suawesi Selatan Menentang Penjajah Asing*.
- Dias Pradadimara, dkk (peny.). 2016. *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Frederick, William H, 2005. "Penampilan Revolusi: Pakaian, Seragam, dan Gaya Pemuda di Jawa Timur 1945-1949", dalam Henk Schulte Nordhold (ed), *Outward Appearances: Tren, Identitas, Kepentingan*, Yogyakarta: LKIS, KITLV.
- Harun Kadir, dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan (1945-1950)*. Ujung Pandang: Kerjasama Bappeda Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanuddin.
- Harvey, Barbara Sillars. 1989a. *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Harvey, Barbara Sillars. 1989c. "Sulawesi Selatan: Boneka dan Patriot" dalam Audrey R. Kahin. *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Ichlasul Amal. 1988. *Hubungan Pusat-Daerah: Kasus Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan 1949-1979*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.
- Ide Anak Agung Gde Agung. 1985. *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press..
- J. R. Chaniago. 2002. "Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia: Peranan Pemimpin Lokal dalam Dinamika Politik di Sulawesi Selatan dan Sumatera Timur 1950." *Disertasi Universitas Gadjah Mada*, tak diterbitkan.
- Kahin, George Mc Turnan. 1995. *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Semarang: Sebelas Maret University Press dan Pustaka Sinar Harapan.
- Koerts, H.J., 2001. "Amtenar BB di Sulawesi Selatan" dalam S.L. van Der Wal (peny.), *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920-1942* (Jakarta: Penerbit Djembatan-KITLV
- Manai Sophiaan. 1991. *Apa Yang Masih Teringat*. Jakarta: Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
- Mestika Zed. 2005. *Giyûgun: Cikal-bakal Tentara Nasional di Sumatera*, Jakarta: LP3ES.

- Much. Hasyim. 1982. "Struktur Organisasi Kelaskaran Di Sulawesi Selatan", dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventaris Dan Dokumentasi Sejaran Nasional 1983/1984, Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Suawesi Selatan Menentang Penjajah Asing.
- Muhammad Abduh, dkk, 1983/1984. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Sulawesi Selatan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventaris Dan Dokumentasi Sejaran Nasional.
- Muhammad Amir.2001 "Pertentangan Antara Golongan Unitaris dan Federalis di Sulawesi Selatan 1945-1950". *Laporan Penelitian*: Makassar, Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Mohammad Saleh La Hade. 1982. "Korban 40.000 Jiwa di Sulawesi Selatan dan Artinya Bagi Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia," dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventaris Dan Dokumentasi Sejaran Nasional 1983/1984, *Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan Menentang Penjajah Asing*, Ujung Pandang.
- M. Sanusi Dg. Mattata. 1962. *Luwu Dalam Revolusi*. Makassar: Yayasan Pembangunan Asrama IPMIL.
- Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.1991. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Departemen Dalam Negeri di Propinsi Sulawesi Selatan*. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
- Pelras, Christian. *Manusia Bugis* (terj.) 2005. Abdul Rahman Abu, dkk. Jakarta: Nalar, Forum Jakarta-Paris, EFEO.
- Reid, Anthony,"Revolusi Sosial: Revolusi Nasional," *Prisma*, Nomor 8 Tahun Ke X, (Agustus 1981), 30-55
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Kahin, Audrey. 1990. *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- R. Nalenan, 1981. *Arnold Mononutu: Potret Seorang Pejuang*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Sanusi Dg. Mattata, 1967. *Luwu Dalam Revolusi*, Makassar: Yayasan Pembangunan Asrama IPMIL.
- Sartono Kartodirdjo. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Sebuah Alternatif*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sartono Kartodirdjo. 1993. *Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sarita Pawiloy. 1987. *Sejarah Perjuangan Angkatan 45 di Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Dewan Harian Angkatan 45 Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 1985-1989.
- Schulte Nordholt, Henk,2002. *Kriminalitas, Modernitas dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutherland, Heather. 2013. "Meneliti Sejarah Penulisan Sejarah" dalam Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto dan Ratna Saptari (ed.), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- T.B Simatupang, 1982. "Revolusi dan Kita Sekarang,"dalam William H. Frederick dan Soeri Soeroto (Peny.) *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, Jakarta: LP3ES.
- Taufik Abdullah. 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Taufik Abdullah, 1995. "Pengalaman, Kesadaran dan Sejarah," Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 27 November 1995.
- Taufik Abdullah. 2001. *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Satya Historika.